

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR
TAHUN TENTANG INDIKATOR
KINERJA KUNCI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 (dua) jenis dan masing-masing memiliki bobot yang berbeda sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Makro dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

a. Capaian Kinerja Makro

Penilaian capaian kinerja makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Penilaian capaian kinerja makro dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebagai berikut:

No	Indikator Capaian Kinerja Makro	Bobot
1	Indeks Modal Manusia	20%
2	Persentase Penduduk Miskin	20%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

b. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Perubahan Kinerja Makro

Penilaian perubahan kinerja makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menilai perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Penilaian perubahan kinerja makro dilakukan dengan menghitung laju kinerja indikator kinerja makro pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebagai berikut:

No	Indikator Capaian Kinerja Makro	Bobot
1	Indeks Modal Manusia	20%
2	Persentase Penduduk Miskin	20%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

B. PEMBOBOTAN INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1. Capaian Kinerja Makro dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dengan bobot 85%.
 - a. Capaian Kinerja Makro dengan bobot 10%;
 - b. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dengan bobot 90%.
- 2. Perubahan Kinerja Makro dengan bobot 15%.

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI PROVINSI

Pemerintah Daerah Provinsi melaporkan 114 IKK, sebagai berikut.

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	4%
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	4%
3	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	4%
4	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	4%
5	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Nilai	4%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
6	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	4%
7	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	4%
8	Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Nilai	4%
9	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	4%
10	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Nilai	4%
11	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	4%
12	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Nilai	4%
13	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Estimasi penyerapan lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah	%	4%
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Estimasi persentase kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah	%	3%
15	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
16	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
17	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
18	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
19	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
20	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
21	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
22	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
23	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
24	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
25	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
26	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
27	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
28	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%
29	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	3%

b. Kesehatan (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	Per 100.000 Kelahiran Hidup	16%
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	$\frac{\text{Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar Deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Persen	16%
3	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh penduduk di wilayah yang menjadi target untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	%	17%
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan (layanan medis dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, gizi darurat, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, promosi kesehatan) saat tanggap darurat krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	%	17%
5	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	$\frac{\text{Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan yang mendapat pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko penyakit KLB sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh penduduk di wilayah yang ditargetkan untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko penyakit KLB sesuai standar}} \times 100\%$	%	17%
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak (terinfeksi) dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh orang yang terdampak (terinfeksi) dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	%	17%

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Provinsi (ha)}} \times 100\%$	%	7,5%
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob di wilayah kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob Kewenangan Provinsi (ha)}} \times 100\%$	%	7,5%
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)}} \times 100\%$	%	7,5%
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi (Ha)}} \times 100\%$	%	7,5%
5	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun N}}{\text{Jumlah kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan pada tahun N (non kumulatif)}} \times 100\%$	%	10%
6	Persentase kabupaten/kota yang dibina penyelenggaraan SPAM	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang dibina penyelenggaraan SPAM pada tahun N}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di provinsi (non kumulatif)}} \times 100\%$	%	10%
7	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	$\frac{\text{Peningkatan akses sanitasi layak dan aman: Jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T pada tahun N}}{\text{Jumlah rumah tangga di Provinsi (non kumulatif)}} \times 100\%$	%	10%
8	Persentase kabupaten/kota yang dibina dalam sistem pengelolaan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah kab/kota yang dibina sistem pengelolaan air limbah domestik pada tahun N}}{\text{Jumlah kab/kota di provinsi (non kumulatif)}} \times 100\%$	%	5%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
9	Persentase kabupaten/kota yang dibina sistem pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang dibina sistem pengelolaan persampahan pada tahun N}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di provinsi (non kumulatif)}} \times 100\%$	%	5%
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi (km) (Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang)}}{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi (km)}} \times 100\%$	%	10%
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli bersertifikat kompetensi kerja (yang masih berlaku) yang bekerja pada tahun berjalan}}{\text{Target sertifikasi yang tercantum dalam renja provinsi}} \times 100\%$	%	5%
12	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	$\frac{(\text{rasio pengawasan tertib usaha} + \text{rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi} + \text{rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk})}{3} \times 100\%$	%	5%
13	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun}} \times 100\%$	%	5%
14	Jumlah hari layanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang /KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang 100% telah dibayarkan PNPB KKPR-nya oleh pemohon (maksimal 20 hari)	Hari	5%

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	%	25%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	%	25%
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{Target luas kawasan kumuh 10-15 Ha pada tahun N}} \times 100\%$	%	25%
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Realisasi jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$	%	25%

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	6%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	%	6%
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	orang	6%
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	$\frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10}} \times 100\%$	%	6%
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan = 4}} \times 100\%$	%	6%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
6	Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	$\frac{\text{Jumlah pejabat fungsional yang ada di Satpol PP}}{\text{Jumlah PNS pada Satpol PP}} \times 100\%$	%	6%
7	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	$\frac{\text{Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP}} \times 100\%$	%	6%
8	Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang telah difasilitasi dan/atau sosialisasi dalam penyusunan dokumen rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal pada tahun n}}{\text{Target jumlah Kabupaten/Kota yang direncanakan untuk difasilitasi dan/atau sosialisasi dalam penyusunan dokumen rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal pada Provinsi tahun n}} \times 100\%$	%	6%
9	Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang telah difasilitasi dan/atau sosialisasi dalam penyusunan rencana induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal}}{\text{Target jumlah Kabupaten/Kota yang direncanakan untuk difasilitasi dan/atau sosialisasi dalam penyusunan Tahapan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal}} \times 100\%$	%	6%
10	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	$\frac{\text{Jumlah Aparatur pemadam kebakaran yang telah ditingkatkan kapasitasnya minimal diklat pemadam I baik di provinsi maupun kab/kota pada tahun n}}{\text{Target jumlah aparatur pemadam kebakaran yang akan ditingkatkan kapasitasnya minimal diklat pemadam I baik di provinsi maupun kab/kota pada tahun n}} \times 100\%$	%	6%
11	Presentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional	$\frac{\text{Jumlah jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran baik di provinsi maupun kab/kota pada tahun n}}{\text{jumlah kebutuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran baik di provinsi maupun kab/kota pada tahun n}} \times 100\%$	%	5%
12	Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan di kab/kota pada tahun n}}{\text{total Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di kab/kota pada tahun n}} \times 100\%$	%	5%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standard	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai standard di kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Target pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan berdasarkan Norma Standard Prosedur Manual dan terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun n}} \times 100\%$	%	5%
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Penyelesaian dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n}}{\text{jumlah dokumen kebencanaan yang direncanakan pada rencana kerja Perangkat Daerah untuk disusun pada tahun n}} \times 100\%$	%	5%
15	persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana pada tahun n}}{\text{jumlah target kabupaten/kota di provinsi yang direncanakan penanganan pra bencana dan terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$	%	5%
16	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$	%	5%
17	Persentase penanganan pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pascabencana}}{\text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$	%	5%
18	Persentase Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun n}}{\text{jumlah total rencana kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja pada tahun n}} \times 100\%$	%	5%

f. Sosial (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen dikali 100\%}} \times 100\%$	%	8%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen}} \times 100\%$	%	8%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$	%	7%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut gelandangan dan pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$	%	7%
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis yang tersedia di dalam panti}} \times 100\%$	%	7%
6	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar}}{\text{Jumlah keseluruhan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan/atau gelandangan dan pengemis}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi}} \times 100\%$	%	7%
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}} \times 100\%$	%	7%
9	Persentase pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana}} \times 100\%$	%	7%
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	%	7%
11	Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang layak dan sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA}} \times 100\%$	%	7%
12	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
13	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah provinsi}} \times 100\%$	%	7%
14	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan cakupan daerah provinsi yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi}} \times 100\%$	%	7%

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	17%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	%	17%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$	Rp/Org	17%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	%	17%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	%	16%
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$	%	16%

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>$IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$</p> <p>$IPG = (IPM \text{ Perempuan}) / (IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$</p> <p>I Kesehatan = Umur Harapan Hidup Saat Lahir I Pendidikan = Penggabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) I Pengeluaran = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender</p>	Indeks	20%
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	<p>$IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$</p> <p>Keterangan: HARM (GF ,GM) : Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan</p> <p>$G_{F,M} = \sqrt[3]{Kesehatan \cdot Pemberdayaan \cdot IPK}$</p> <p>GF, M : Indeks dimensi</p> <p>Rumus Indeks Kesehatan adalah:</p> <p>$Kesehatan = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,01}{faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}} \right)}{2}$</p> <p>Rumus Indeks pemberdayaan adalah:</p> <p>$Pemberdayaan = (\sqrt{PR_F \cdot S_F} + \sqrt{PR_M \cdot S_M}) / 2$</p> <p>Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah</p> <p>$IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$</p> <p>Dimana: Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi Pemberdayaan: indeks pemberdayaan IPK : Indeks Pasar Kerja</p> <p>Indeks Perempuan dihitung dengan formula:</p> <p>$G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0,01}{faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot S_F) \cdot TPAK_F}$</p> <p>formula untuk Indeks Laki-laki:</p> <p>$G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot S_M)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_M}$</p>	Indeks	20%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
		Keterangan G _F : Indeks Perempuan G _M :Indeks Laki-laki Faskes:Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan ULP: Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR _F : Persentase perempuan yang duduk di parlemen PR _M : Persentase perempuan yang duduk di parlemen SE _F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA SE _M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA TPAK _F : Persentaseangkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja Persentase laki-laki yang duduk di parlemen TPAK _M : Persentase laki - laki terhadap penduduk kerja		
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja operasi dan belanja modal di provinsi/kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	20%
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$	%	20%
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$	%	20%

c. Pangan (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi}}{\text{Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023}} \times 100\%$	%	25%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1. Pengelompokkan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan	Skor 0-100	25%
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan rentan rawan pangan}}{\text{Jumlah total kecamatan di provinsi}} \times 100\%$	%	25%
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kemandirian pangan segar asal tumbuhan <i>post market</i> (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan <i>pre market</i> (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%	%	25%

d. Pertanian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{(\text{Jumlah luas Tanah Obyek Landreform})}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	%	12,5%
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah Garapan belum bersertipikat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah Garapan belum bersertipikat}} \times 100\%$	%	12,5%
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu kota atau kabupaten lengkap secara berkualitas	$\frac{\text{Jumlah kota atau kabupaten lengkap berkualitas}}{\text{Jumlah kota atau kabupaten dalam satu provinsi}} \times 100\%$	%	12,5%
4	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	%	12,5%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
5	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum}} \times 100\%$	%	12,5%
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi	$\frac{(\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi})}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	%	12,5%
7	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi}} \times 100\%$	%	12,5%
8	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	$\frac{\text{Presentase luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA yang dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Persentase realisasi dari target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.}} \times 100\%$	%	12,5%

e. Lingkungan Hidup (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	34%
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi}}{\text{Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung}} \times 100\%$	%	33%
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	$\frac{\text{Nilai IKPS rata-rata Kabupaten/Kota pada Kategori Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil yang ada di wilayah Provinsi}}{\text{Jumlah kategori Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi}}$	Indeks	33%

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$	%	18%
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa Perkawinan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$	%	18%
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa perceraian yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$	%	17%
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	$\frac{\text{Akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$	%	17%
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}} \times 100\%$	%	17%
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun.	$\frac{\text{Jumlah Data Kependudukan yang disusun}}{\text{Dua Dokumen}} \times 100\%$	%	17%
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (Akumulasi dari data seluruh kabupaten/kota)}}{\text{Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP}} \times 100\%$	%	17%

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_n - \text{jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}} \times 100\%$	%	20%
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah terfasilitasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	%	20%
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani}} \times 100\%$	%	20%
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	$\frac{\text{Jumlah LKD yang terfasilitas}}{\text{Jumlah LKD}} \times 100\%$	%	20%
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	$\frac{\text{Jumlah LAD dan LMHA yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah LAD dan LMHA}} \times 100\%$	%	20%

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR Provinsi}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	20%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	$\frac{\text{Total Peserta KB Aktif modern}}{\text{Total Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun}} \times 100\%$	%	20%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Provinsi}}{\text{Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	20%
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$[ASFR]_{(15-19)} = K_{(15-19)} / P_{(15-19)} \times 1000$	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	20%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<p>iBangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100</p> <p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial</p>	Indeks (Skala 0-100)	20%

i. Perhubungan (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Konektivitas Provinsi	$K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ <p>KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %)</p> <p>Jumlah WTD + WTL = 100%</p>	Rasio	25%
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$	%	25%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum}}$	%	25%
4	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan}}{\text{Targte Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan}} \times 100\%$	%	25%

j. Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$	%	34%
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Provinsi}} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	33%

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$\frac{(\sum \text{Volume usaha Koperasi tahun berjalan} - \sum \text{Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya})}{\sum \text{Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	25%
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	$\frac{\sum \text{usaha kecil yang memperoleh NIB}}{\sum \text{usaha kecil dan menengah (UKM)}} \times 100\%$	%	25%
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	$\frac{\text{Jumlah UKM menjalin kemitraan} + \text{Jumlah UKM yang telah melakukan ekspor}}{\text{Jumlah UKM}} \times 100\%$	%	25%
4	Pertumbuhan Wirausaha	$\frac{(\sum \text{Wirausaha tahun berjalan} - \sum \text{Wirausaha tahun sebelumnya})}{\sum \text{Wirausaha tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	25%

1. Penanaman Modal (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{\text{(Jumlah nilai investasi tahun n-jumlah nilai investasi tahun n-1) di provinsi}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun n-1 di provinsi}} \times 100\%$	%	50%
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	$\frac{\text{Total Realisasi Investasi Provinsi}}{\text{Target Investasi Provinsi yang ditetapkan oleh BKPM kepada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	50%

m. Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	= Rata-Rata Domain IPP - Nilai Domain berdasarkan rata rata Nilai transformasi indikator Masing-masing Domain	Indeks	50%
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	$\frac{\text{Jumlah Atlet provinsi yang berhasil masuk dalam Pelatnas}}{\text{Jumlah Atlet provinsi yang dibinai ditingkat Provinsi (KONI, PPLP, PPLD, Induk Cabor)}} \times 100\%$	%	50%

n. Statistik (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnin Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.	Poin	100%

o. Persandian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	$\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI (918)}} \times 100\%$	%	100%

p. Kebudayaan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	%	34%

r. Kearsipan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	$IHPKpd = 0,6 \text{ NHPe} + 0,4 \text{ NHPi}$ $IHPKpd = \text{Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah,}$ $\text{NHPe} = \text{Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal,}$ $\text{NHPi} = \text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal}$	Nilai	100%

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Kawasan konservasi daerah yang operasional	$\frac{\text{Jumlah Luas Kawasan Konservasi daerah yang operasional}}{\text{Jumlah luas kawasan konservasi daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan}} \times 100\%$	%	20%
2	Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$	%	20%
3	Produksi Perikanan Budi Daya	$\frac{\text{Produksi Perikanan Budi Daya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budi Daya}} \times 100\%$	%	20%
4	Produksi Garam	$\frac{\text{Produksi Garam}}{\text{Target Produksi Garam}} \times 100\%$	%	20%
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	$\frac{\text{Pelaku usaha yang patuh}}{\text{pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$	%	20%

b. Pariwisata (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	$\frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akmamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$	%	25%
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	$\frac{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N)} - (\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1)})}{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1)})} \times 100\%$	%	25%
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	$\frac{\text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	%	25%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	$\frac{\text{Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$ <p>Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham</p>	%	25%

c. Pertanian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{(\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun ini} - \text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin})}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}} \times 100\%$	%	33%
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	$\frac{\text{Nilai peningkatan produksi hortikultura}}{\text{produksi hortikultura tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	33%
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	$\frac{(\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun ini} - \text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin})}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin}} \times 100\%$	%	34%

d. Kehutanan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	$\frac{\text{Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi}}{\text{luas target tahunan rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara dalam 1 provinsi}} \times 100\%$	%	34%
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB daerah	$\frac{\text{Nilai Kontribusi Sektor Kehutanan dalam PDRB Provinsi atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)}}{\text{Nilai PDRB Provinsi atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)}} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	$\frac{\text{Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)}}{\text{Luas target tahunan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)}} \times 100\%$	%	33%

e. Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase cekungan air tanah dalam provinsi yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah cekungan air tanah dalam provinsi yang ditetapkan}}{\text{jumlah cekungan air tanah dalam provinsi}} \times 100\%$	%	25%
2	Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	1. Ada 2. Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	25%
3	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/ pergub	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah}}{\text{Target Nilai Perolehan Air Tanah Yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	25%
4	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	%	25%

f. Perdagangan (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke provinsi lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}}{\text{target jumlah nilai penjualan barang ke provinsi lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}} \times 100\%$	%	33%
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani pada Tahun N}}{\text{Jumlah Pendaduan Konsumen yang masuk pada tahun N}} \times 100\%$	%	34%
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun (dalam US\$)}}{\text{Target jumlah nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun (dalam US\$)}} \times 100\%$	%	33%

g. Perindustrian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	<p>Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut. Setiap sasaran memiliki bobot 20%:</p> <p>1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%- Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%- Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% <p>dan seterusnya</p> <p>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 20%, misalnya</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%- Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%- Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% <p>dan seterusnya</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%- Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%- Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16 % <p>dan seterusnya</p> <p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%- Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%- Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% <p>dan seterusnya</p> <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%- Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%- Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% <p>dan seterusnya</p> <p>Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome (40%)</p>	%	40%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{\text{Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri}}{\text{total investasi seluruh sektor}} \times 100\%$	%	10%
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan}}{\text{jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan}} \times 100\%$	%	10%
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik'}}{\text{seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan}} \times 100\%$	%	10%
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%	%	30%

h. Transmigrasi (Bobot Urusan: 0%)
Tidak Ada

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan (Bobot Urusan: 5%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang di dukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$	%	100%

b. Keuangan (Bobot Urusan: 30%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	$\frac{\text{Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$	%	17%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	%	17%
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}}{\text{Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}} \times 100\%$	%	17%
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	$\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N - 1}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N-1}} \times 100\%$	%	17%
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	$\frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa}} \times 100\%$	%	16%
6	Persentase Penurunan SILPA	$\frac{\text{Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1}}{\text{Nilai SILPA Tahun N - 1}} \times 100\%$	%	16%

c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Bobot Urusan: 5%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Kategori penilaian: A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20	indeks	100%

d. Penelitian dan Pengembangan (Bobot Urusan: 10%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah}} \times 100\%$	%	50%
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	%	50%

e. Fungsi Pengawasan (Bobot Urusan: 25%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	<p>1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.</p> <p>3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.</p>	Kategori / Opini	20%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p>Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1;- Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2;- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3;- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5 <p>Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah</p>	Nilai (1-5)	20%
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<p>Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2;- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3;- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 <p>Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah</p>	Nilai (2-5)	20%
4	Manajemen Risiko Indeks	<p>Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1;- Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2;- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3;- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5 <p>Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.</p>	Nilai (1-5)	20%
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	$\frac{\text{Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}} \times 100\%$	%	20%

f. Fungsi Pengadaan (Bobot Urusan: 10%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	30%
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	30%
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40%

g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah (Bobot Urusan: 10%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	1. Tepat 2. Tidak Tepat	Tepat/ Tidak Tepat	50%
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\%$	%	50%

h. Pelayanan Publik (Bobot Urusan: 5%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	100%

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan 177 IKK, sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	7%
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$	%	7%
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	7%
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	7%
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	7%
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	7%
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.	%	7%
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten.	%	7%
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	7%
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%

b. Kesehatan (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Jumlah Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	Orang	18%
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	$\frac{\text{Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar Deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	%	18%
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$	%	17%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	%	17%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$	%	17%
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	%	17%
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	%	17%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	%	17%

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	$\frac{\text{Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$	%	10%
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100\%$	%	10%
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$	%	10%
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$	%	10%
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	10%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N} + \text{Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional} + \text{jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N}}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	10%
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Permohonan PBG \& SLF yang diproses terhadap permohonan PBG \& SLF yang masuk}}{\text{Peningkatan jumlah permohonan PBG \& SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG \& SLF yang telah diterbitkan}} \times 100\%$	%	10%
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Panjang Jalan Kondisi Baik} + \text{Panjang Jalan Kondisi Sedang}) \text{ panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}}{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}} \times 100\%$	%	10%
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis yang bekerja pada tahun berjalan}}{\text{jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota}} \times 100\%$	%	5%
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	$\frac{(\text{rasio pengawasan tertib usaha} + \text{rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi} + \text{rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk})}{3} \times 100\%$	%	5%
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNPB KKPR-nya oleh pemohon}}{\text{Hari}}$	Hari	5%
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun}} \times 100\%$	%	5%

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	%	20%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	%	20%
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N}} \times 100\%$	%	20%
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	$\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}} \times 100\%$	%	20%
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$	%	20%

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	8%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	%	8%
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	orang	7%
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	$\frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan} = 4} \times 100\%$	%	7%
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	$\frac{\text{Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP}} \times 100\%$	%	7%
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	7%
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	7%
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	%	7%
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n}} \times 100\%$	%	7%
11	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$	%	7%
12	Persentase penanganan pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	$\frac{\text{Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n}} \times 100\%$	%	7%
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	7%

f. Sosial (Bobot Urusan: 7%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	8%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	8%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	7%
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	7%
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}} \times 100\%$	%	7%
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	7%
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar}}{\text{jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}} \times 100\%$	%	7%
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana}} \times 100\%$	%	7%
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	7%
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar}}{\text{populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan}} \times 100\%$	%	7%
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miksin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	7%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi}}{\text{Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi}} \times 100\%$	%	7%
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan	%	7%

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$	%	20%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	%	20%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$	Rp/Orang	20%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	%	20%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	%	20%

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG = (IPM \text{ Perempuan}) / (IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ <p>I Kesehatan = Umur Harapan Hidup Saat Lahir I Pendidikan = Penggabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) I Pengeluaran = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender</p>	Indeks	20%
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$ <p>Keterangan: HARM (GF ,GM) : Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan</p> $G_{F,M} = \sqrt[3]{Kesehatan \cdot Pemberdayaan \cdot IPK}$ <p>GF, M : Indeks dimensi</p> <p>Rumus Indeks Kesehatan adalah:</p> $Kesehatan = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,01}{faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}} \right)}{2}$ <p>Rumus Indeks pemberdayaan adalah:</p> $Pemberdayaan = (\sqrt{PR_F \cdot S_F} + \sqrt{PR_M \cdot S_M}) / 2$ <p>Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah</p> $IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$ <p>Dimana: Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi Pemberdayaan: indeks pemberdayaan IPK : Indeks Pasar Kerja</p> <p>Indeks Perempuan dihitung dengan formula:</p> $G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0,01}{faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot S_F) \cdot TPAK_F}$ <p>formula untuk Indeks Laki-laki:</p> $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_M}$		20%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
		Keterangan G _F : Indeks Perempuan G _M :Indeks Laki-laki Faskes:Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan ULP: Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR _F : Persentase perempuan yang duduk di parlemen PR _M : Persentase perempuan yang duduk di parlemen SE _F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA SE _M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA TPAK _F : Persentaseangkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja Persentase laki-laki yang duduk di parlemen TPAK _M : Persentase laki - laki terhadap penduduk kerja		
3	Persentase ARG Daerah	% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG	%	20%
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$ Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban.	%	20%
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$	%	20%

c. Pangan (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023}} \times 100\%$	%	25%
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	<div>1. Pengelompokkan pangan</div> <div>2. Konversi bentuk, jenis dan satuan</div> <div>3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan</div> <div>4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan</div> <div>5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen)</div> <div>6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE)</div> <div>7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan.</div> <div>8. Menghitung skor AKE</div> <div>9. Menghitung Skor PPH</div> <div>10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan</div>	Nilai 0-100	25%
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	$\frac{\text{Jumlah desa dan/atau kelurahan rentan rawan pangan}}{\text{Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten}} \times 100\%$	%	25%
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%	%	25%

d. Pertanian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	$\frac{\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	12%
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan	$\frac{\text{luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	%	11%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
	pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran			
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	$\frac{\text{Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah.}}{\text{target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}} \times 100\%$	%	11%
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	$\frac{\text{realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}}{\text{target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}} \times 100\%$	%	11%
5	Terselesainya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat}} \times 100\%$	%	11%
6	Terpetaknya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas}}{\text{jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota}} \times 100\%$	%	11%
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	%	11%
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	11%
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan pelayan BPHTB	$\frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	11%

e. Lingkungan Hidup (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	34%
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH 2. SDM PENGELOLA SAMPAH 3.SARANA DAN PRASARANA (PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH) 4. ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH 5. SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PENGELOLAAN SAMPAH 6. ACCEPTABILITY & iMPLEMENTASI 7. CAPAIAN TERHADAP TARGET DAN KAPASITAS 8. EFISIENSI ANGGARAN (RASIO INCREMENTAL CAPAIAN DAN TARGET PER KELAS ANGGARAN) 9. KOTA BERSIH (PENILAIAN ADIPURA) 10. NILAI IKA (INDEKS KUALITAS AIR), KOMPONEN DARI IKLH.	%	33%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung}} \times 100\%$	%	33%

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$	%	15%
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$	%	15%
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100\%$	%	14%
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	$\frac{\text{akta kelahiran yang diterbitkan dibagi}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$	%	14%
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}} \times 100\%$	%	14%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	$\frac{\text{Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\%$	%	14%
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital}}{\text{Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP}} \times 100\%$	Persen	14%

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_n - \text{jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}} \times 100\%$ Note: Untuk tahun 2024 masih menggunakan IDM, sementara untuk tahun 2025 pakai indeks desa, jika mau dipisahkan menggunakan output Jumlah Bumdes.	%	20%
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah terfasilitasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	%	20%
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani}} \times 100\%$	%	20%
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga emasyarakatan Desa	$\frac{\text{Jumlah LKD yang terfasilitasi}}{\text{jumlah LKD}} \times 100\%$	%	20%
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	$\frac{\text{Jumlah LAD dan LMHA yang terfasilitas}}{\text{jumlah LAD dan LMHA}} \times 100\%$	%	20%

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Kabaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	20%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	$\frac{\text{Banyaknya Peserta KB aktif modern}}{\text{Banyaknya pasangan usia subur}} \times 100\%$ (PUS) PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	%	20%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota}}{\text{Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	20%
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$[ASFR] (15-19) = K_{(15-19)} / P_{(15-19)} \times 1000$	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	20%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial</p> <p>Formula iBangga: iBangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100</p>	Nilai 0-100	20%

i. Perhubungan (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ <p>KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %)</p> <p>Jumlah WTD + WTL = 100%</p>	Rasio	34%
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum}} \times 100\%$	%	33%

j. Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$	%	34%
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota}} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	33%

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$\frac{\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun berjalan} - \Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	34%
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	$\frac{\Sigma \text{ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\Sigma \text{ Jumlah UMKM}} \times 100\%$	%	33%
3	Pertumbuhan Wirausaha	$\frac{(\Sigma \text{ Wirausaha tahun berjalan} - \Sigma \text{ Wirausaha tahun sebelumnya})}{\Sigma \text{ Wirausaha tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	33%

1. Penanaman Modal (Bobot Urusan: 3%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi tahun n-jumlah nilai investasi tahun n-1}) \text{ di kab/kota}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun n-1 di kab/kota}} \times 100\%$	%	50%
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	$\frac{\text{Total Realisasi Investasi Kab/Kota}}{\text{Target Investasi Kap/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	50%

m. Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota}} \times 100\%$	%	50%
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi}}{\text{Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)}} \times 100\%$	%	50%

n. Statistik (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.	Poin	100%

o. Persandian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	$\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI (918)}} \times 100\%$	%	100%

p. Kebudayaan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	%	34%
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb}} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Kebudayaan}} \times 100\%$	%	33%

q. Perpustakaan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$TGM = 0.3 TFM + 0.3 TDM + 0.3 TJB + 0.05 FAI + 0.05 DAI$ Keterangan: TGM = Nilai Tingkat Kegemaran Membaca TFM= Tingkat Frekuensi Membaca TDM= Tingkat Durasi Membaca TJB = Jumlah buku dibaca FAI = Frekuensi Akses Internet DAI= Durasi Akses Internet	Nilai	50%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Keterangan: UPLM1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan; UPLM2 = Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; UPLM3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; UPLM4 =Tingkat Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan; UPLM5 = Perpustakaan yang dibina sesuai standar; UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam Perpustakaan; UPLM7 = Anggota Perpustakaan; AM = Aspek Masyarakat	Nilai	50%

r. Kearsipan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	$IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi$ IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal, NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	100%

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$	%	50%
2	Produksi Perikanan Budi Daya	$\frac{\text{Produksi Perikanan Budi Daya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budi Daya}} \times 100\%$	%	50%

b. Pariwisata (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	$\frac{\text{Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N} - \text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1}}{\text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1}} \times 100\%$	%	34%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	$\frac{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang dan Non Bintang Tahun N) - (Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun N-1)})}{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1)})} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	$\frac{\text{Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$	%	33%

c. Pertanian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun ini - Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}} \times 100\%$	%	17%
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	$\frac{\text{Produksi Holtikultura Tahun ini- Produksi hortikultura Tahun Kemarin}}{\text{Produksi hortikultura tahun kemarin}} \times 100\%$	%	17%
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	$\frac{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun ini - Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin)}} \times 100\%$	%	17%
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun N - Produksi PerkebunanTahun N-1}}{\text{Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin-Produksi Perkebunan tahun N-1}} \times 100\%$	%	17%
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	$\frac{\text{luas terkena DPI yang ditangani tahun ini}}{\text{Di bagi luas terkena DPI total}} \times 100\%$	%	16%
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$	%	16%

d. Kehutanan (Bobot Urusan: 0%)
Tidak Ada

e. Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan: 0%)
Tidak Ada

f. Perdagangan (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	$\frac{\text{Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}}{\text{Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah)}} \times 100\%$	%	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	%	

g. Perindustrian (Bobot Urusan: 2%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1.	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	<p>Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut:</p> <p>1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya</p> <p>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) = 27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dan seterusnya</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya</p>	%	40%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
		<p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100% --> Bobot maksimal 5%- Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5%- Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% <p>dan seterusnya</p> <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian 100% --> Bobot maksimal 20%- Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18%- Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% <p>dan seterusnya</p> <p>Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%</p>		
2.	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%	%	10%
3.	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibagi dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan dikali 100%	%	10%
4.	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibagi seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan dikali 100%	%	10%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
5.	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%	%	30%

h. Transmigrasi (Bobot Urusan: 0%)
Tidak Ada

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (dengan Bobot 10%)
a. Perencanaan (Bobot Urusan: 5%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang di dukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$	%	100%

b. Keuangan (Bobot Urusan: 30%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	$\frac{\text{Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan uru yang dialokasikan Melalui TKD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$	%	17%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	%	17%
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}}{\text{Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}} \times 100\%$	%	17%
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	$\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N - 1}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N-1}} \times 100\%$	%	17%
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	$\frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktru Pelayanan Publik}}{\text{Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa}} \times 100\%$	%	16%
6	Persentase Penurunan SILPA	$\frac{\text{Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1}}{\text{Nilai SILPA Tahun N - 1}} \times 100\%$	%	16%

c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Bobot Urusan: 5%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Kategori penilaian : A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20	indeks	100%

d. Penelitian dan Pengembangan (Bobot Urusan: 10%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah}} \times 100\%$	%	50%
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan}}$	Rasio	50%

e. Fungsi Pengawasan (Bobot Urusan: 25%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	<p>1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.</p> <p>3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.</p>	Kategori / Opini	20%

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah	Nilai (1-5)	20%
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah	Nilai (2-5)	20%
4	Manajemen Risiko Indeks	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.	Nilai (1-5)	20%
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	$\frac{\text{Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1}} \times 100\%$	%	20%

f. Fungsi Pengadaan (Bobot Urusan: 10%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	30%
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	30%
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40%

g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah (Bobot Urusan: 10%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	1. Tepat 2. Tidak Tepat	Tepat/ Tidak Tepat	50%
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\%$	%	50%

h. Pelayanan Publik (Bobot Urusan: 5%)

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	100%

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN